



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://disbun.sumselprov.go.id>*

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Tujuan	1
2. Sasaran	1
3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	4
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah	6
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)..	7
B. Latar Belakang Penyusunan Laporan	8
1. Maksud	8
2. Tujuan	8
BAB II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025	9
A. Realisasi Belanja APBD	9
B. Indikator Kinerja OPD	10
C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah.....	10
BAB III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT..	11
BAB IV. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

1. Tujuan

Dinas perkebunan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan. Ada empat komoditas utama perkebunan yang menjadi perhatian penting karena memiliki luasan yang cukup besar. Adapun komoditas tersebut adalah Kopi, Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan areal produksi perkebunan
- 2) Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan

- 3) Meningkatkan perlindungan perkebunan
- 4) Dukungan kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan.

Sasaran, tujuan, strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Meningkatkan Areal Produksi Perkebunan	Perluasan Areal Perkebunan	Mendorong Pengembangan Lahan-Lahan yang tidak dimanfaatkan
		Optimalisasi Lahan Perkebunan Yang Kurang Produktif	Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan
		Meningkatkan Penggunaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Melakukan rehabilitasi tanaman perkebunan yang kurang produktif
			Melakukan Diversifikasi tanaman existing dengan tanaman tanaman lain
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Penanganan Panen sesuai Standar Anjuran	Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan alat dan mesin perkebunan agar menjadi lebih efektif
			Meningkatkan serta melakukan pengawasan ketersediaan dan penggunaan benih unggul
			Meningkatkan ketersediaan sarana air dalam mendukung peningkatan produktivitas tanaman
			Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan perkebunan
	Meningkatkan Perlindungan Perkebunan	Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sektor Perkebunan	Mendorong peningkatan sistem pengolahan sesuai anjuran
			Meningkatkan serta melakukan pengawasan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman
			Mencegah serta meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan

3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Pagu anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 30.543.864.046,-** dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	: Rp. 29.823.864.046,-
◆ Belanja Pegawai	: Rp. 11.857.840.482,-
◆ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 17.966.023.564,-
Belanja Modal	: Rp. 720.000.000,-
◆ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 350.000.000,-
◆ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 370.000.000,-

Pagu anggaran sebesar Rp. 30.543.864.046,- terdiri atas 6 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - 3) Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- b. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang di Kabupaten Empat Lawang.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme di Kabupaten Banyuasin
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian di Kabupaten Musi Rawas, OKU Selatan, Lahat, OKU, dan Kabupaten OKU Timur
- e. Sub kegiatan lainnya akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota.

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang akurat dan objektif kepada pihak yang membutuhkan, meningkatkan akuntabilitas serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian program/kegiatan/sub kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk:

- 1. Mendorong transparansi dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi organisasi kepada pemangku kepentingan
- 2. Menilai capaian target kinerja yang telah ditetapkan diawal perencanaan kerja
- 3. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kedepan
- 4. Menjadi bahan dalam identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BAB II.
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD
TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Realisasi Belanja APBD

Tabel 3. Realisasi Belanja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	
		KEUANGAN (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	29.823.864.046	10.286.217.495	34,49
- Belanja Pegawai	11.857.840.482	5.438.658.807	45,87
- Belanja Barang dan Jasa	17.966.023.564	4.847.558.688	26,98
BELANJA MODAL	720.000.000	341.687.890	47,46
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.000.000	341.687.890	92,35
TOTAL BELANJA	30.543.864.046	10.627.905.385	34,80

Realisasi pelaksanaan pogram/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

B. Indikator Kinerja OPD

Tabel 4. Realisasi capaian perjanjian kinerja (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan	%	0,40	0,35	87,50	Data adalah angka sementara
		Meningkatnya luas areal perkebunan	Ha	2.965.000	2.849.225	96,10	Data adalah angka sementara
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet	Ton/Ha/Thn	1,48	1,20	81,08	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha/Thn	3,55	3,45	97,18	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kopi	Ton/Ha/Thn	0,95	0,94	98,95	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa	Ton/Ha/Thn	1,19	1,16	97,48	Data adalah angka sementara
		Jumlah Benih Unggul yg beredar	Benih	17.250.000	10.715.318	62,12	Data adalah data sampai Bulan Juni
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan	%	13,75	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan	Unit	316	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama	%	24,15	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	Kelompok	93	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	115,15	143,82	135,21	Sumber data: press release Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Selatan
	Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	Ha	750	38.206	> 100	banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
	Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50	50	

C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

Belum ada penghargaan yang diraih Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang triwulan II tahun 2025.

BAB III.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala yang dihadapi sepanjang triwulan II tahun anggaran 2025 belum terlalu banyak, kendala yang sangat mempengaruhi adalah adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan harus menyusun kembali rencana pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatannya.

Tindak lanjutnya adalah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perkebunan sepanjang triwulan II Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat membantu memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian target. Dan adanya evaluasi secara berkala ini dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Palembang, 07 Juli 2025

**KETUA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Ir. AGUS DARWA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19650824 199403 1 002